TA'LIMUNA
JURNAL PENDIDIKAN ISLAM
P-ISSN 2085-2975 E-ISSN 2622-9889

ANALISIS STANDAR PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMAN 1 KLARI KARAWANG

Analysis of Standard Financing in Improving Education Quality at SMAN 1 Klari Karawang

Fadilah Nur Zikriyah
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
2310631110092@student.unsika.ac.id

Dimo Aditia Nugroho
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
2310631110086@student.unsika.ac.id

Fathiyah Azahra
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
2310631110096@student.unsika.ac.id

Hinggil Permana
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
hinggil.permana@fai.unsika.ac.id

Keywords
Pendidikan
Peningkatan Mutu
Sekolah Menengah Atas
Standar Pembiayaan

Abstract

This article aims to analyze the implementation of education financing at SMAN 1 Klari Karawang from a legal perspective and strategies for improving education quality through effective and efficient financing. It uses a qualitative approach and case study method with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the management of financing at SMAN 1 Klari is in accordance with the law, particularly Government Regulation No. 57 of 2021 and Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation No. 18 of 2023. The evidence is that the Education Unit Operational Assistance (BOSP) funds are managed transparently through ARKAS (School Activity and Budget Plan Application), although various obstacles are still encountered, such as delays in fund distribution and budget constraints.

Meanwhile, to improve the quality of education through funding standards, SMAN 1 Klari implements strategies for efficient use of internal assets, maintains the effectiveness of programs even though their quality is not optimal, and involves voluntary support from parents and the community. In conclusion, SMAN 1 Klari has implemented the principles of transparency, accountability, and participation in the management of education costs, which has ultimately become the key to improving the quality of education at the school.

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi pembiayaan pendidikan di SMAN 1 Klari Karawang dari perspektif perundang-undangan serta strategi peningkatan mutu pendidikan melalui efektivitas dan efisiensi pembiayaan. Menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan pembiayaan di SMAN 1 Klari sesuai dengan perundang-undangan, khususnya PP Nomor 57 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023. Buktinya adalah dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dikelola secara transparan melalui ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), meskipun masih dijumpai berbagai kendala seperti keterlambatan penyaluran dana dan keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui standar pembiayaan, SMAN 1 Klari menerapkan strategi efisiensi penggunaan aset internal, menjaga efektivitas program meski kualitasnya tidak maksimal, serta melibatkan dukungan sukarela dari orang tua dan masyarakat. Kesimpulannya, SMAN 1 Klari telah menerapkan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan biaya pendidikan, hingga akhirnya menjadi kunci peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Received	Revised	Accepted	Available Online
1 Agustus 2025	22 September 2024	31 Agustus 2025	30 September 2025

A. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum pada UUD 1945 pada alinea keempat. Pendidikan mempunyai proses yang memberikan pengetahuan bahkan pengalaman baru kepada peserta didik. Adapun pembiayaan pendidikan menjadi perkara yang paling utama agar roda pendidikan dapat berjalan. Seorang kepala sekolah harus mampu mengidentifikasi dan

melakukan pengukuran terhadap nilai ekonomi untuk pendidikan, alokasi sumber-sumber dalam pendidikan, gaji tenaga pendidik, biaya pendidikan dan perencanaan pendidikan (Cohn, 1979)

Upaya meningkatkan pemerataan kesempatan pendidikan memerlukan dukungan biaya serta alokasi sumber daya yang berkualitas. Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada perhitungan yang tepat dan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Penggunaan dana pendidikan perlu disesuaikan dengan anggaran yang telah direncanakan dan dikelola secara transparan, sehingga seluruh program dan kegiatan sekolah dapat terlaksana dengan optimal. Sudah jelas proses pendidikan harus membutuhkan transparan dan akuntabel.

Pembiayaan pada sebuah lembaga pendidikan begitu penting untuk menentukan program pendidikan untuk dapat berjalan dan berkembang (Mesiono et al., 2021). Tanpa adanya pembiayaan pendidikan, maka pendidikan akan tersendat sehingga akhirnya tidak beroperasi. Biaya pendidikan ini menjadi komponen yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan, baik tujuan kuantitatif maupun kualitatif. Peranan biaya tidak dapat diabaikan, sehingga dapat dikatakan tanpa biaya, proses pendidikan tidak akan berjalan. Ramayulis menjelaskan pendidikan dapat terlaksana dengan baik, apabila didukung oleh dana yang memadai, sebab mutu dan kualitas pendidikan tidak bisa terlepas dari tersedianya dana.

Biaya pendidikan terdiri atas biaya langsung (oleh sekolah, peserta didik dan/atau keluarga peserta didik) dan juga biaya tidak langsung (Sagala, 2007). Biaya-biaya langsung begitu diperhatikan, namun biaya tidak langsung pada umumnya ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Kedua biaya ini harus sesuai dengan sistem sekolah dan manajemen pembiayaan pendidikan yang baik agar dapat dikelola secara optimal. Dengan demikian, pembiayaan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pendidik dan mutu pendidikan itu sendiri.

Masalah pembiayaan pendidikan menjadi sorotan tersendiri dalam dunia pendidikan, banyak lembaga pendidikan yang kurang mampu dalam manajemen, merencanakan, mengelola dan melakukan pelaporan pembiayaan yang terdapat dalam pendidikan. Hal yang terpenting adalah bagaimana kebijakan lembaga pendidikan dalam manejemen keuangan yang ada di lembaga pendidikan itu sendiri. Berdasarkan tinjauan dari sisi ekonomi, tidak ditemukan kegiatan pendidikan yang tidak ada biayanya, apalagi saat dikaitkan dengan kualitas proses dan hasil pendidikan. Semakin tinggi tuntutan kualitas pendidikan, semakin tinggi pula pembiayaan yang dibutuhkan. Biaya diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan proses pendidikan (Fatah, 2012).

Mutu pendidikan merupakan hasil dari pengelolaan pendidikan yang unggul, efektif, dan efisien sehingga dapat melahirkan peserta didik yang berprestasi baik secara akademik maupun non-akademik (Suti, 2011). Apabila kebijakan pembiayaan pendidikan direalisasikan dengan baik, maka proses pendidikan akan berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan pemasukan biaya

pendidikan yang terarah agar pelaksanaannya optimal. Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada implementasi pembiayaan di SMAN 1 Klari Karawang dari perspektif perundang-undangan serta strategi peningkatan mutu pendidikan di SMAN 1 Klari Karawang melalui efektivitas dan efisiensi pembiayaan.

B. METODE

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah suatu metode untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena sentral (Raco, 2010). Sedangkan studi pustaka adalah mengumpulkan literatur dari beragam sumber seperti buku, artikel, dan literatur lainnya yang terkait dengan tema.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Observasi adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dalam penelitian ini dengan cara mengunjungi lokus penelitian, yaitu SMAN 1 Klari Karawang. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya kepada responden. Dalam penelitian ini adalah Bapak Tata Suwanta S.Pd.I selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Keuangan. Dokumentasi diperoleh melalui data privat milik SMAN 1 Klari Karawang maupun data yang terbuka untuk umum.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Suharsaputra, 2018). Keabsahan data dalam penelitian ini diperkuat dengan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu (Sugiyono, 2019).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Praktik Pembiayaan di SMAN 1 Klari dari Perspektif Perundang-Undangan

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2021. Pasal 32 menyebutkan bahwa standar pembiayaan adalah standar minimum mengenai berbagai komponen pembiayaan dalam pendidikan di satuan pendidikan. Lebih lanjut, Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023 Pasal 2 menjelaskan bahwa standar pembiayaan berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab pembiayaan pendidikan tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan masyarakat sepanjang sesuai ketentuan hukum.

Pembiayaan adalah pendanaan dari pihak lain untuk mendukung program yang direncanakan individu dan Lembaga (Sudarmono, 2021). Standar pembiayaan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), dan diharapkan menjadi pedoman dalam melaksanakan pendidikan pada semua jenjang di Indonesia (Nopiyerto, 2021). Biaya pendidikan merupakan komponen instrumental penting dalam penyelenggaraan sekolah (Nurhayati et al., 2022).

Hasil wawancara di SMA Negeri 1 Klari menunjukkan bahwa praktik pembiayaan sudah mengikuti aturan perundang-undangan. Bapak Tata Suwarta S.Pd.I. menyatakan:

> *Standar pembiayaan di satuan pendidikan sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, serta dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam konteks SMA Negeri 1 Klari, standar pembiayaan mengacu pada ketentuan tersebut, khususnya melalui dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) atau BOS yang berasal dari pemerintah pusat.*

Dana Bantuan Oprasional Satuan Pendidikan (BOSP) dialokasikan untuk kegiatan intrakurikuler-ekstrakurikuler, penyediaan sarana prasarana, serta peningkatan kompetensi guru. Sesuai aturan, BOSP tidak boleh digunakan untuk membayar gaji guru PNS, karena hal itu menjadi tanggungan pemerintah pusat. Sementara gaji guru non-PNS dibiayai melalui Biaya Oprasional Pendidikan Daerah (BOPD).

Dari sisi kecukupan, dana pemerintah mencukupi untuk kebutuhan pokok, tetapi masih diperlukan dukungan sukarela dari orang tua/masyarakat untuk peningkatan mutu. Hal ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang membolehkan adanya partisipasi sukarela dari masyarakat. Bapak Tata Suwanta, S.Pd.I menyebutkan:

> *Alokasi dana yang tersedia dari pemerintah memang mencukupi untuk kebutuhan pokok operasional sekolah. Akan tetapi, dukungan dan keterlibatan aktif dari orang tua serta masyarakat tetap diperlukan agar mutu pendidikan dapat terus ditingkatkan secara optimal.*

Dari aspek akuntabilitas, SMAN 1 Klari telah menjalankan sistem evaluasi melalui Tim BOS, Tim Pengembang Sekolah, serta pemeriksaan rutin Dinas Pendidikan. Laporan keuangan juga dikelola dengan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang langsung terhubung kepada Kemendikbudristek. Dalam rangka transparansi penggunaan anggaran, SMAN 1 Klari menampilkan Rincian Pendapatan dan Penggunaan Dana BOS pada papan informasi sekolah yang dapat diakses oleh seluruh warga sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana BOS dilakukan secara terbuka sesuai prinsip akuntabilitas yang diamanatkan dalam juknis BOS dan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1
Rincian Pendapatan dan Penggunaan Dana BOS di SMA Negeri 1 Klari

Jika dikaitkan dengan penelitian sebelumnya di SMA Negeri 6 Batang Hari, terlihat kesamaan bahwa pemenuhan standar pembiayaan tidak hanya soal ketersediaan dana, tetapi juga bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan di SMAN 1 Klari sudah sesuai kerangka hukum, meskipun masih terdapat gap antara standar ideal dan keterbatasan di lapangan.

2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di SMAN 1 Klari Melalui Standar Pembiayaan

Strategi pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sekolah dapat didukung secara memadai oleh sumber dana yang tersedia. Sekolah harus mampu merencanakan, mengelola, serta mengevaluasi penggunaan dana agar tercapai efektivitas dan efisiensi sesuai kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen pendidikan yang menekankan perencanaan berbasis kebutuhan, skala prioritas, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (Fattah, 2012).

Keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang dihadapi sekolah, sehingga strategi efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan. Prinsip ini sesuai dengan juknis BOS yang menekankan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Bapak Tata Suwarta S.Pd.I memberikan contoh strategi efisiensi:

> *Dalam kegiatan pengembangan karakter siswa melalui penanaman nilai-nilai Islami, seperti peringatan hari besar Islam, sekolah tidak lagi menyewa fasilitas tambahan dari luar. Sebaliknya, sekolah memanfaatkan fasilitas internal yang sudah tersedia.*

Dengan cara ini, kegiatan tetap berjalan sesuai tujuan meski tidak maksimal dari segi fasilitas. Bapak Tata Suwarta S.Pd.I menyatakan:

> *Sebuah kegiatan idealnya dapat mencapai kualitas 80%, namun karena keterbatasan dana, pelaksanaannya hanya bisa di tingkat 60%.*

Selain efisiensi internal, strategi lain adalah melibatkan dukungan masyarakat secara sukarela:

> *Idealnya, ketika tidak ada pungutan atau iuran resmi, orang tua dapat berkontribusi secara sukarela, dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, untuk membantu peningkatan mutu pendidikan di sekolah tempat putra-putri mereka belajar.*

Strategi yang diterapkan di SMAN Klari selaras dengan teori yang menyatakan bahwa sumber daya pendidikan meliputi sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, orang tua), sumber daya fisik (gedung, sarana), serta sumber daya keuangan (Asmawi, 2010). Dengan demikian, strategi peningkatan mutu di SMAN 1 Klari bukan hanya efisiensi finansial, tetapi juga optimalisasi sumber daya lainnya.

Lebih lanjut, sesuai dengan perspektif teoretis yang menyatakan bahwa strategi pembiayaan harus memfokuskan pada program-program yang menjadi objek biaya, agar efektivitas dan efisiensi dapat tercapai (Kurniady, 2011). Kemampuan pengelola pembiayaan sekolah dalam menentukan strategi menjadi faktor penting, karena salah satu kunci keberhasilan pembangunan pendidikan terletak pada

kapasitas SDM dalam mengelola dana sesuai kebutuhan pokok dan skala prioritas program (W. P, 2013). Dalam konteks ini, sekolah dapat menentukan strategi pembiayaan melalui analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman) (SWOT). Misalnya, meminimalkan kelemahan berupa keterbatasan dana dengan memanfaatkan peluang berupa dukungan komite, orang tua, maupun alumni (Margareta & Ismanto, 2017).

Di SMAN 1 Klari, keterbatasan anggaran disiasati dengan efisiensi penggunaan fasilitas internal, pelibatan orang tua secara sukarela, serta pengelolaan yang terencana melalui Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) dan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS). Dengan demikian, strategi peningkatan mutu di SMAN 1 Klari dapat dilihat dalam tiga aspek utama berikut:

Pertama, Efisiensi penggunaan dana. SMAN 1 Klari berusaha memaksimalkan aset sekolah yang ada. Misalnya, dalam kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar Islam, sekolah tidak lagi menyewa fasilitas luar yang membutuhkan biaya besar, melainkan menggunakan panggung permanen serta *sound system* milik sekolah. Dengan langkah ini, kegiatan tetap berjalan baik meskipun dana terbatas.

Kedua, Efektivitas program. Walaupun keterbatasan anggaran membuat kualitas kegiatan tidak selalu maksimal, sekolah tetap menjaga agar substansi dan tujuan kegiatan tercapai. Sebagai contoh, sebuah kegiatan idealnya dapat mencapai kualitas 80%, namun karena keterbatasan dana hanya dapat dijalankan sekitar 60%. Meskipun demikian, esensi kegiatan tetap terlaksana sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh siswa.

Ketiga, Keterlibatan masyarakat. Peran orang tua dan masyarakat sangat penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dukungan tersebut harus bersifat sukarela tanpa paksaan agar tidak menyalahi aturan mengenai pungutan di sekolah negeri. Partisipasi orang tua dalam bentuk kontribusi sukarela dianggap mampu membantu sekolah memenuhi kebutuhan yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh dana BOS, seperti kegiatan tambahan maupun program pengembangan mutu pendidikan.

Strategi pembiayaan di SMAN 1 Klari menunjukkan bahwa keterbatasan dana bukan menjadi hambatan mutlak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Melalui efisiensi pemanfaatan aset sekolah, efektivitas pelaksanaan program yang tetap berorientasi pada tujuan utama, serta keterlibatan masyarakat secara sukarela, sekolah mampu menjaga kesinambungan proses pendidikan. Praktik ini sekaligus mencerminkan implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan sesuai regulasi yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi pembiayaan di SMAN 1 Klari Karawang telah sesuai dengan perundang-undangan, khususnya PP Nomor 57 Tahun 2021 dan Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2023. Dana BOSP dikelola secara transparan melalui sistem ARKAS, meskipun masih

terdapat keterbatasan anggaran dan keterlambatan penyaluran. Untuk mengatasinya, sekolah menerapkan strategi peningkatan mutu melalui efisiensi penggunaan aset internal, efektivitas pelaksanaan program meski dengan keterbatasan dana, serta keterlibatan sukarela orang tua dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian lain yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta strategi efisiensi dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan pada pemilihan narasumber dan cakupan data yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan Bendahara sekolah sebagai informan kunci, membandingkan lebih dari satu sekolah, serta mempertimbangkan pendekatan kuantitatif agar hasilnya lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi, M. R. (2010). Strategi Meningkatkan Lulusan Bermutu di Perguruan Tinggi. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, *9*(2), 66-71.

Cohn, E. (1979). *The Economic of Education*. Ballinger Publishing Compan.

Fattah, N. (2012). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Kurniady, D.A. (2011). Pengelolaan Pembiayaan Sekolah Dasar di Kabupaten Bandung. *Disertasi Universitas Pendidikan Indonesia*.

Margareta, R. T. E., & Ismanto, B. (2017). Strategi Perencanaan Pembiayaan Sekolah dalam Peningkatan Mutu di SMP Negeri. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, *4*(2), 195-204.

Mesiono, M., Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, *4*(02), 447–456.

Nopiyerto, N. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan. *Manajer Pendidikan*, *15*(2), 67–74.

Nurhayati et al. (2022). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, *3*(2), 597.

Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.

Sagala, S. (2007). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistsem Otonomi Sekolah*. Alfabeta.

Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Anwar Us, K. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, *2*(1), 266-280.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suharsaputra, U. (2018). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Refika Aditama.

Suti, M. (2011). Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pnedidikan. *Jurnal MEDTEK*, *3*(2), 1–6.

W. P, F. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, *19*(4), 565–578.